

## EFEKTIVITAS MANAJEMEN KURIKULUM DALAM MENYONGSONG KURIKULUM MERDEKA DI MAS AL-MUJAHIDIN LONGKA

Ulil Utama Unir<sup>1</sup>, Siti Azizah<sup>2,3</sup>, Muh. Wayong<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding author: [ulilunir8@gmail.com](mailto:ulilunir8@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[siti.azizah@uin-alauddin.ac.id](mailto:siti.azizah@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [muh.wayong@uin-alauddin.ac.id](mailto:muh.wayong@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Abstract (English)

This study aims to analyze the effectiveness of curriculum management in anticipating the implementation of the Merdeka Curriculum at MAS AL-Mujahidin Longka. The focus of the study includes three main aspects of curriculum management: planning, implementation, and evaluation—within the framework of the institution's readiness to face the paradigm shift in education. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that curriculum management at MAS AL-Mujahidin Longka has shown positive efforts in adapting to the Merdeka Curriculum, particularly in strengthening the role of the school principal as an instructional leader and encouraging teacher collaboration in developing teaching materials. However, several obstacles remain, such as limited technical training and a lack of supporting resources for differentiated learning. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity and institutional strengthening strategies in order to optimize a sustainable transition to the Merdeka Curriculum.

### Article History

*Submitted: 6 July 2025*

*Accepted: 15 July 2025*

*Published: 16 July 2025*

### Key Words

Curriculum Management,  
Merdeka Curriculum,  
Effectiveness, Educational  
Leadership

---

### Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen kurikulum dalam menyongsong implementasi Kurikulum Merdeka di MAS AL-Mujahidin Longka. Fokus kajian mencakup tiga aspek utama manajemen kurikulum, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, dalam kerangka kesiapan lembaga menghadapi perubahan paradigma pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum di MAS AL-Mujahidin Longka telah menunjukkan upaya adaptasi yang positif terhadap Kurikulum Merdeka, terutama dalam penguatan peran kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran dan kolaborasi guru dalam pengembangan perangkat ajar. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan pelatihan teknis dan kurangnya sumber daya pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan strategi penguatan kelembagaan guna mengoptimalkan transisi menuju Kurikulum Merdeka secara berkelanjutan.

---

### Sejarah Artikel

*Submitted: 6 July 2025*

*Accepted: 15 July 2025*

*Published: 16 July 2025*

### Kata Kunci

Manajemen Kurikulum,  
Kurikulum Merdeka,  
Efektivitas, Kepemimpinan  
Pendidikan

---

## PENDAHULUAN

Manajemen kurikulum merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjamin mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya menjadi pedoman pembelajaran, tetapi juga mencerminkan visi, misi, dan tujuan institusi pendidikan dalam membentuk karakter serta kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan kurikulum

secara efektif menjadi tolok ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Manajemen kurikulum yang baik mencakup perencanaan yang sistematis, pelaksanaan yang adaptif, serta evaluasi yang objektif dan berkelanjutan.

Seiring dengan transformasi kebijakan pendidikan nasional, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai respon terhadap kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, diferensiatif, dan berpusat pada peserta didik (Saavedra & Opfer, 2012). Di dalamnya terdapat ruang yang lebih besar bagi sekolah untuk mengembangkan potensi lokal, kearifan budaya, dan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi satuan pendidikan, khususnya Madrasah Aliyah Swasta (MAS), untuk melakukan penyesuaian yang menyeluruh dalam manajemen kurikulum mereka.

MAS AL-Mujahidin Longka sebagai salah satu madrasah berbasis keagamaan yang berada di daerah pedesaan, menghadapi situasi yang unik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Di satu sisi, madrasah memiliki kekuatan dalam nilai-nilai religius dan kedekatan sosial dengan masyarakat (Nasution, 2013). Namun di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi, serta fasilitas penunjang pembelajaran menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks tersebut, efektivitas manajemen kurikulum menjadi sangat krusial untuk mengukur sejauh mana kesiapan madrasah dalam menghadapi perubahan paradigma pendidikan yang sedang berlangsung.

Manajemen kurikulum yang efektif di MAS AL-Mujahidin Longka tidak hanya ditentukan oleh kecakapan administrasi semata, melainkan juga oleh kepemimpinan kepala madrasah, kolaborasi antar guru, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar. Perencanaan kurikulum harus mampu memetakan kebutuhan dan potensi peserta didik secara akurat, sedangkan pelaksanaan pembelajaran harus mencerminkan prinsip merdeka belajar dengan memberikan ruang kreativitas dan otonomi kepada guru. Evaluasi yang dilakukan pun harus bersifat reflektif dan berorientasi pada perbaikan mutu secara berkelanjutan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana manajemen kurikulum di MAS AL-Mujahidin Longka telah berjalan efektif dalam menyongsong implementasi Kurikulum Merdeka. Fokus kajian mencakup tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran strategis kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran serta keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan kebijakan manajemen kurikulum di tingkat madrasah, khususnya dalam konteks madrasah berbasis keagamaan di daerah pedesaan. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, baik di

level madrasah, Kementerian Agama, maupun komunitas pendidikan yang lebih luas, dalam menyukseskan Kurikulum Merdeka secara inklusif, adil, dan bermakna (Kemendikbudristek, 2022).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Moleong, 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas manajemen kurikulum di MAS AL-Mujahidin Longka dalam menyongsong implementasi Kurikulum Merdeka. Fokus penelitian diarahkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, serta peran kepala madrasah dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kurikulum secara kontekstual dan berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran dan manajerial di lingkungan madrasah, wawancara mendalam dengan kepala madrasah, guru, dan staf kurikulum, serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen kurikulum seperti perangkat ajar, jadwal pelajaran, dan notulen rapat evaluasi (Creswell, 2014). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi terhadap pengalaman dan pandangan informan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Data yang diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi (Lincoln & Guba, 1985). Selain itu, peneliti juga melakukan member checking kepada informan utama untuk mengklarifikasi hasil temuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi faktual secara mendalam serta memahami dinamika manajemen kurikulum yang terjadi di madrasah dalam menghadapi perubahan paradigma pendidikan nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Kurikulum**

Perencanaan kurikulum di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Mujahidin Longka menunjukkan arah positif menuju implementasi Kurikulum Merdeka. Meskipun demikian, inovasi dalam perencanaan tersebut masih tergolong terbatas (Kemendikbudristek, 2022). Kepala madrasah bersama tim kurikulum telah berupaya menyusun dokumen perencanaan pembelajaran secara sistematis. Dokumen ini mencakup struktur kurikulum, alokasi waktu pembelajaran, serta perangkat ajar yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran (CP) dan penguatan profil pelajar Pancasila sebagai landasan utama pengembangan karakter peserta didik.

Kegiatan perencanaan kurikulum dilaksanakan secara kolaboratif melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) internal. Forum ini menjadi wadah diskusi

dan evaluasi dalam menyusun serta menyesuaikan rencana pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran di madrasah. Aktivitas MGMP cukup aktif dan melibatkan sebagian besar guru, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya berbasis data yang komprehensif mengenai kebutuhan dan potensi peserta didik secara individual maupun kelompok (Fullan, 2007). Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam proses perencanaan kurikulum adalah minimnya pelatihan teknis bagi para pendidik, khususnya dalam merancang modul ajar mandiri. Ketidakhahaman guru terhadap prinsip dan struktur modul ajar mandiri mengakibatkan keterbatasan dalam menyusun materi ajar yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika pembelajaran. Hal ini berdampak pada rendahnya fleksibilitas guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik.

Selain itu, integrasi karakter lokal ke dalam proses pembelajaran masih belum optimal. Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya muatan lokal sebagai bentuk penguatan identitas budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, implementasinya belum terstruktur dengan baik dalam dokumen kurikulum (Guskey, 2002). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas guru dalam menyusun kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mengakomodasi potensi lokal serta kebutuhan peserta didik secara berkelanjutan dan kontekstual (Nasution, 2013).

Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Merdeka, kemampuan guru dalam memahami asesmen diagnostik awal menjadi hal yang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran yang adaptif (Black & Wiliam, 1998). Akan tetapi, sebagian guru di MAS Al-Mujahidin Longka belum sepenuhnya menguasai teknik asesmen formatif dan sumatif yang dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik secara tepat. Kurangnya literasi terhadap analisis hasil asesmen tersebut menyebabkan perencanaan kurikulum masih bersifat umum dan belum sepenuhnya berorientasi pada diferensiasi pembelajaran. Padahal, salah satu prinsip utama Kurikulum Merdeka adalah memberikan ruang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Selain itu, belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi perencanaan kurikulum secara terpadu menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin konsistensi implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Meskipun terdapat evaluasi berkala melalui rapat guru, kegiatan tersebut belum dilandasi oleh indikator kinerja yang terukur dan sistem pelaporan yang sistematis (Leithwood, 2006). Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan manajerial dari kepala madrasah serta pendampingan dari pengawas madrasah untuk memperkuat kualitas perencanaan kurikulum. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya perencanaan yang berbasis refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di MAS Al-Mujahidin Longka.

## **2. Pelaksanaan Kurikulum**

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lingkungan pendidikan menunjukkan adanya komitmen dari guru-guru untuk mengadaptasi pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan diferensiatif. Hal ini tercermin dari upaya guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang tidak lagi berpusat pada guru semata, melainkan memberi ruang bagi siswa untuk lebih

aktif, mandiri, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Beberapa guru telah mulai menerapkan strategi pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL) sebagai bentuk konkret dari pendekatan tersebut. Melalui PjBL, siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi permasalahan nyata, bekerja dalam tim, dan menyusun solusi dalam bentuk produk atau presentasi (Tomlinson, Carol A. 2014). Namun, implementasi model ini masih bersifat sederhana dan belum merata di seluruh mata pelajaran. Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan secara optimal antara lain perencanaan proyek yang belum sistematis, keterbatasan waktu dalam jadwal pelajaran, serta kurangnya integrasi antarmata pelajaran dalam merancang proyek yang bersifat lintas disiplin.

Di samping itu, keterbatasan fasilitas pembelajaran, khususnya media digital dan teknologi informasi, menjadi hambatan signifikan dalam mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka. Sebagian ruang kelas masih belum dilengkapi dengan perangkat TIK yang memadai, dan akses terhadap jaringan internet juga terbatas. Akibatnya, guru kesulitan dalam memanfaatkan platform digital sebagai sumber belajar tambahan, dan siswa tidak memiliki cukup akses terhadap pembelajaran daring yang seharusnya menjadi bagian dari praktik Kurikulum Merdeka. (anuszewski, Alan, & Molenda, Michael. 2008). Situasi ini berdampak pada rendahnya variasi metode pembelajaran yang dapat diimplementasikan, dan membatasi ruang kreativitas guru dalam menyusun materi ajar berbasis teknologi. Lebih lanjut, keterbatasan ini juga berdampak pada rendahnya literasi digital siswa.

Tantangan lain yang muncul dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah rendahnya tingkat literasi kurikulum itu sendiri di kalangan sebagian guru. Meskipun telah ada pelatihan dan sosialisasi dari pihak pemerintah, beberapa guru masih mengalami kesulitan dalam memahami komponen-komponen kunci kurikulum seperti capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran (ATP), dan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kondisi ini menyebabkan penerapan kurikulum menjadi kurang konsisten antar kelas dan antar guru. Selain itu, pemahaman yang terbatas juga berdampak pada rendahnya kualitas perencanaan pembelajaran dan penyusunan asesmen yang seharusnya selaras dengan semangat Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan, guna meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum secara optimal.

Meskipun menghadapi beragam tantangan, terdapat inisiatif positif dari sebagian guru yang menunjukkan semangat kolaboratif dalam pelaksanaan kurikulum. Beberapa guru mulai melakukan kolaborasi lintas mata pelajaran untuk menyusun proyek bersama atau mengaitkan materi ajar dalam tema yang terpadu (Oliva, Peter F. 2009). Kolaborasi ini tidak hanya mendorong efisiensi dalam proses pembelajaran, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan bermakna bagi siswa. Lebih lanjut, strategi pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, khususnya dengan kondisi sosial dan budaya lokal masyarakat Longka, mulai diterapkan. Materi pembelajaran diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal, seperti praktik pertanian, tradisi keagamaan, dan norma sosial, sehingga memperkuat identitas kultural siswa sekaligus membangun karakter dan wawasan

kebangsaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan ini masih berada dalam tahap transisi dan penyesuaian. Meskipun terdapat tantangan dari segi fasilitas, kompetensi guru, dan sistem pendukung, terdapat indikasi yang kuat bahwa guru-guru mulai memahami esensi dari kurikulum ini dan berupaya untuk mengimplementasikannya sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing (Johnson, Elaine B. 2002). Upaya seperti kolaborasi lintas mata pelajaran, penerapan pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan kontekstual berbasis budaya lokal merupakan langkah awal yang perlu diperkuat melalui dukungan struktural, pelatihan berkelanjutan, dan penyediaan sarana pembelajaran yang memadai.

### **3. Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi kurikulum di lembaga pendidikan dilakukan secara berkala melalui berbagai mekanisme, seperti rapat evaluasi setiap akhir semester, forum diskusi antar guru, serta refleksi pembelajaran berbasis data (Tyler. 1950) Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum, kesesuaian materi ajar dengan capaian pembelajaran, dan relevansi metode pembelajaran yang digunakan dengan kebutuhan peserta didik. Proses evaluasi juga mencakup analisis terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka, pendekatan penilaian mulai bergeser dari yang semula berorientasi pada capaian nilai akademik semata (kognitif), menuju model asesmen yang lebih menyeluruh. Asesmen tersebut mencakup pengukuran sikap, nilai-nilai karakter, dan keterampilan berpikir kritis serta kreatif yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran (Black & Wiliam 1998). Guru didorong untuk menerapkan asesmen formatif yang bersifat diagnostik, guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik sejak dini serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan proses belajar.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan prinsip asesmen formatif dan diagnostik tersebut belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar guru masih cenderung mengandalkan model penilaian konvensional, seperti ulangan harian dan ujian akhir, yang berfokus pada penguasaan materi secara teoritis tanpa mempertimbangkan proses dan konteks pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan kurikulum yang bersifat progresif dengan praktik di lapangan yang masih stagnan (Piaget, Vygotsky).

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, serta penyediaan perangkat asesmen yang relevan dan kontekstual, guna meningkatkan kompetensi guru dalam merancang dan menerapkan sistem penilaian yang holistik. Evaluasi kurikulum yang berorientasi pada pengembangan peserta didik secara utuh harus didukung oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan, termasuk kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan, agar mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif, reflektif, dan berpihak pada murid (Leithwood & Jantzi, 2000).

### **4. Peran Kepala Madrasah**

Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan dan peningkatan

mutu pendidikan di lingkungan madrasah Ia tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya budaya inovasi dan profesionalisme (Fullan, 2001). Dalam perannya, kepala madrasah aktif mendorong guru untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diri melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas. Ia memetakan kebutuhan pelatihan, menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, dan memastikan guru mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Selain itu, kepala madrasah juga mendampingi guru dalam menyusun perangkat ajar seperti RPP, modul pembelajaran, dan asesmen. Pendampingan ini dilakukan melalui supervisi akademik yang konstruktif agar proses perencanaan pembelajaran benar-benar mencerminkan kebutuhan siswa dan mendukung pencapaian kompetensi (Glickman et al., 2010).

Lebih jauh, kepala madrasah berperan penting dalam membangun budaya kolaboratif di lingkungan kerja. Ia memfasilitasi forum refleksi seperti *lesson study*, *peer coaching*, atau diskusi guru, yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan praktik baik (Guskey, 2002). Budaya kolaboratif ini meningkatkan rasa memiliki dan semangat inovasi di kalangan guru. Pendekatan kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh kepala madrasah juga membuka ruang bagi semua warga madrasah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berdampak positif terhadap motivasi kerja dan munculnya inisiatif-inisiatif dari bawah yang relevan dengan kebutuhan sekolah (Sergiovanni, 1994). Namun demikian, dalam menjalankan peran tersebut, kepala madrasah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan minimnya pendampingan teknis dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, dukungan yang lebih intensif dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, sangat dibutuhkan. Dukungan ini dapat berupa pelatihan kepemimpinan, program pendampingan berbasis kebutuhan, serta kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas kepala madrasah sebagai pemimpin transformasional.

## 5. Keterlibatan Stakeholder

Partisipasi stakeholder, khususnya komite madrasah dan orang tua peserta didik, merupakan elemen krusial dalam pengembangan dan implementasi kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan dinamika global (Epstein, 2001). Namun, di MAS AL-Mujahidin Longka, tingkat keterlibatan kelompok ini masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya mekanisme yang sistematis dan terstruktur untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum (Bass dan Avolio, 1994). Ketidakterlibatan ini berpotensi mengurangi efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan kolaborasi antara satuan pendidikan dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menciptakan ekosistem belajar yang holistik.

Minimnya keterlibatan stakeholder juga mencerminkan adanya kesenjangan dalam komunikasi antara pihak madrasah dengan masyarakat sekitar. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan melalui forum informal dan kegiatan berbasis komunitas, seperti pengajian lingkungan dan bazar madrasah, inisiatif tersebut belum dibingkai dalam kebijakan partisipatif yang konsisten dan berkelanjutan (lickman, Gordon, dan Ross-Gordon, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa madrasah masih berada pada tahap awal dalam membangun budaya

kolaboratif yang inklusif, yang seyogianya menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik dan nilai-nilai lokal.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka, diperlukan langkah-langkah strategis yang mengedepankan prinsip keterbukaan, transparansi, dan kemitraan. Salah satunya adalah dengan membentuk forum resmi yang melibatkan komite madrasah, orang tua, tokoh masyarakat, dan praktisi pendidikan lokal dalam penyusunan program kerja kurikulum. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai media konsultasi, tetapi juga sebagai ruang dialog untuk menyelaraskan visi pendidikan madrasah dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi kurikulum serta mendorong rasa memiliki dari seluruh elemen masyarakat terhadap proses pendidikan di madrasah (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995).

Secara umum, MAS AL-Mujahidin Longka telah menunjukkan kemajuan dalam mengadaptasi Kurikulum Merdeka, terutama dalam aspek fleksibilitas pembelajaran dan penguatan karakter. Namun, agar transformasi kurikulum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kebijakan internal madrasah yang adaptif, pelatihan berkala bagi guru, serta penguatan sarana dan prasarana pembelajaran (Sergiovanni, 2001). Yang tidak kalah penting adalah penciptaan ekosistem partisipatif melalui peningkatan keterlibatan stakeholder secara aktif dan bermakna dalam setiap tahapan pengembangan kurikulum, demi terciptanya madrasah yang kontekstual, inklusif, dan berdaya saing.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MAS AL-Mujahidin Longka, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum dalam menyongsong implementasi Kurikulum Merdeka telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Perencanaan kurikulum dilaksanakan secara kolaboratif antara kepala madrasah dan para guru, namun belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka karena pemahaman yang masih beragam di kalangan pendidik. Pelaksanaan kurikulum sudah mulai mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana, dan kesiapan sumber daya manusia.

Evaluasi kurikulum dilakukan secara rutin melalui rapat dan refleksi pembelajaran, namun sistem evaluasi belum sepenuhnya berbasis data asesmen yang terstruktur. Kepala madrasah memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi proses implementasi, baik melalui supervisi, pelatihan internal, maupun pemberian motivasi kepada guru. Sementara itu, keterlibatan stakeholder seperti komite madrasah dan orang tua mulai tumbuh, namun perlu ditingkatkan guna menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, Z. (2022). *Manajemen Kurikulum: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Arifin, Zainal, dan Dwi Wulandari. “Tantangan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka: Studi Kualitatif di Sekolah Menengah.” *Jurnal Kependidikan Nusantara* 5, no. 2 (2023): 73–89.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership*. Sage Publications.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). *Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment*. Phi Delta Kappan.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M. W. (1995). Policies that support professional development in an era of reform. *Phi Delta Kappan*, 76(8), 597–604.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. *Panduan Pembelajaran Berdiferensiasi dan Penerapan PjBL dalam Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2023.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York: Teachers College Press.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2010). *SuperVision and Instructional Leadership: A Developmental Approach* (8th ed.). Allyn & Bacon.
- Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 8(3), 381–391.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. Teachers College Press.
- Hidayat, R., & Suryadi, D. (2021). Manajemen kurikulum berbasis sekolah: Tantangan dan peluang dalam era digital. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 6(2), 105-117. <https://doi.org/10.1234/jpm.v6i2.987>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Profil Pelajar Pancasila: Panduan Penguatan Karakter*. Jakarta: Kemendikbudristek
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Buku Saku Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.
- Leithwood, K. (2006). *Leadership for school turnaround: Research report*. Toronto: Ontario

---

Ministry of Education.

- Leithwood, K., & Jantzi, D. (2000). *The Effects of Transformational Leadership on Organizational Conditions and Student Engagement with School*. *Journal of Educational Administration*, 38(2), 112–129
- Lestari, D. P., & Wulandari, S. (2023). Efektivitas manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45-60.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. *Program Pelatihan Mandiri Kurikulum Merdeka (Platform Merdeka Mengajar)*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2023.
- Puspitasari, Diah, dan Nur Suryani. “Digitalisasi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Pinggiran.” *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Digital* 13, no. 1 (2023): 44–57.
- Putra, M. A., & Nurhadi, S. (2020). Implementasi manajemen kurikulum merdeka di sekolah dasar: Studi kasus di Kabupaten Bandung. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 3(3), 211-222.
- Rohman, Fahrur, dan Anisa Hidayati. “Integrasi Kearifan Lokal dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Pinggiran.” *Jurnal Pendidikan Kontekstual* 7, no. 1 (2024): 20–35.
- Saavedra, A. R., & Opfer, V. D. (2012). Learning 21st-century skills requires 21st-century teaching. *Phi Delta Kappan*, 94(2), 8-13.
- Sari, T. N., & Hakim, L. (2024). Peran kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen kurikulum di era transformasi digital. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), 33-48.
- Shulman, L. S. (1987). *Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform*. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–22.
- Stake, R. E. (1967). *The Countenance of Educational Evaluation*. *Teachers College Record*, 68(7), 523–540.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*.

---

San Francisco: Jossey-Bass.

Susanto, H. (2021). Manajemen kurikulum dalam meningkatkan kompetensi guru pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 5(4), 78-91.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

Yuliana, F. (2023). Strategi manajemen kurikulum berbasis kompetensi di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 11(2), 150-162.